

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1. Dasar Pembentukan Organisasi	1
2. Tugas Pokok Dan Fungsi	2
3. Struktur Organisasi	4
4. Sumber Daya Manusia	6
5. Aspek Strategis Organisasi	7
6. Permasalahan Utama	8
7. Sarana dan Prasarana Kerja	20
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
1. Perencanaan Strategis	21
2. Indikator Kinerja Utama	26
3. Perjanjian Kinerja	28
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	31
2. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	35
3. Analisis Capaian Kinerja	38
4. Realisasi Anggaran	56
BAB IV. PENUTUP	60

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran dan juga sebagai bentuk komitmen Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian LKj-IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya peningkatan kinerja di masa mendatang.

K E P A L A

<u>No.</u>	<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Paraf</u>
1.	Asmirilda	Sekretaris
2.	Sri Heri	Kasubbag Prc
3.	Januar	Staf n Perc

Ir. FUAD ASADDIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19600715 198908 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 23 November 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja yang digantikan dengan Petunjuk Teknis Penyusunan LKJ-IP Berdasarkan Permenpan No 53 Tahun 2014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) ini dibuat sebagai acuan bagi instansi pemerintah dalam menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagai wujud pertanggungjawaban lembaga kepada pihak-pihak yang memberi mandat / amanah terutama pada hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Untuk memberikan gambaran umum pertanggungjawaban kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 disampaikan hal – hal sebagai berikut:

- Dalam penyusunan Perencanaan Strategik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 (1) Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah dan (2) Meningkatnya ekonomi Kerakyatan. Sasaran yang ingin dicapai adalah:
 - 1) Peningkatan lapangan industri pengolahan.
 - 2) Peningkatan efisiensi sistem distribusi perdagangan, daya saing komoditi dan ekspor non migas.
 - 3) Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen
 - 4) Peningkatan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM sektor Produksi.

- Ditinjau dari pencapaian sasaran strategik dapat dikategorikan sangat berhasil, dimana dari 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan, 3 (tiga) diantaranya dengan 4 (empat) indikator mencapai diatas 100 (seratus) persen dan 2 (dua) diantaranya dengan 2 (dua) indikator mencapai diatas 80 (enam puluh) persen hingga 100 (seratus) persen, dan 1 sasaran strategis dengan 1 indikator pencapaiannya diatas 60%.
- Sasaran strategis Peningkatan usaha ekonomi koperasi dan UKM sektor produksi dengan indikator Persentase sumbangan koperasi dan UKM terhadap PDRB pencapaiannya hingga diatas 300%, hal ini disebabkan target yang ditetapkan 4% pada awalnya hanya sumbangan terhadap PDRB sektor koperasi saja, namun pada perkembangan selanjutnya indikator berubah menjadi sumbangan PDRB koperasi dan UKM sementara target tidak berubah. Evaluasi Pengukuran Pencapaian Sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana tingkat capaian sasaran dengan realisasi / capaian kinerja, sehingga secara keseluruhan didapatkan hasil 147,43 persen.

Demikian LKj-IP ini dibuat, untuk dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media komunikasi bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur.

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN

Tugas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah provinsi Kalimantan Timur berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 71 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas dan fungsi

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;
- c) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis industri;
- d) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan dalam negeri;
- e) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan luar negeri;

- f) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- g) Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan;
- h) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i) Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural

Adapun tugas pokok dari pejabat struktural di masing-masing bagian struktur organisasi, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Dinas mempunyai :

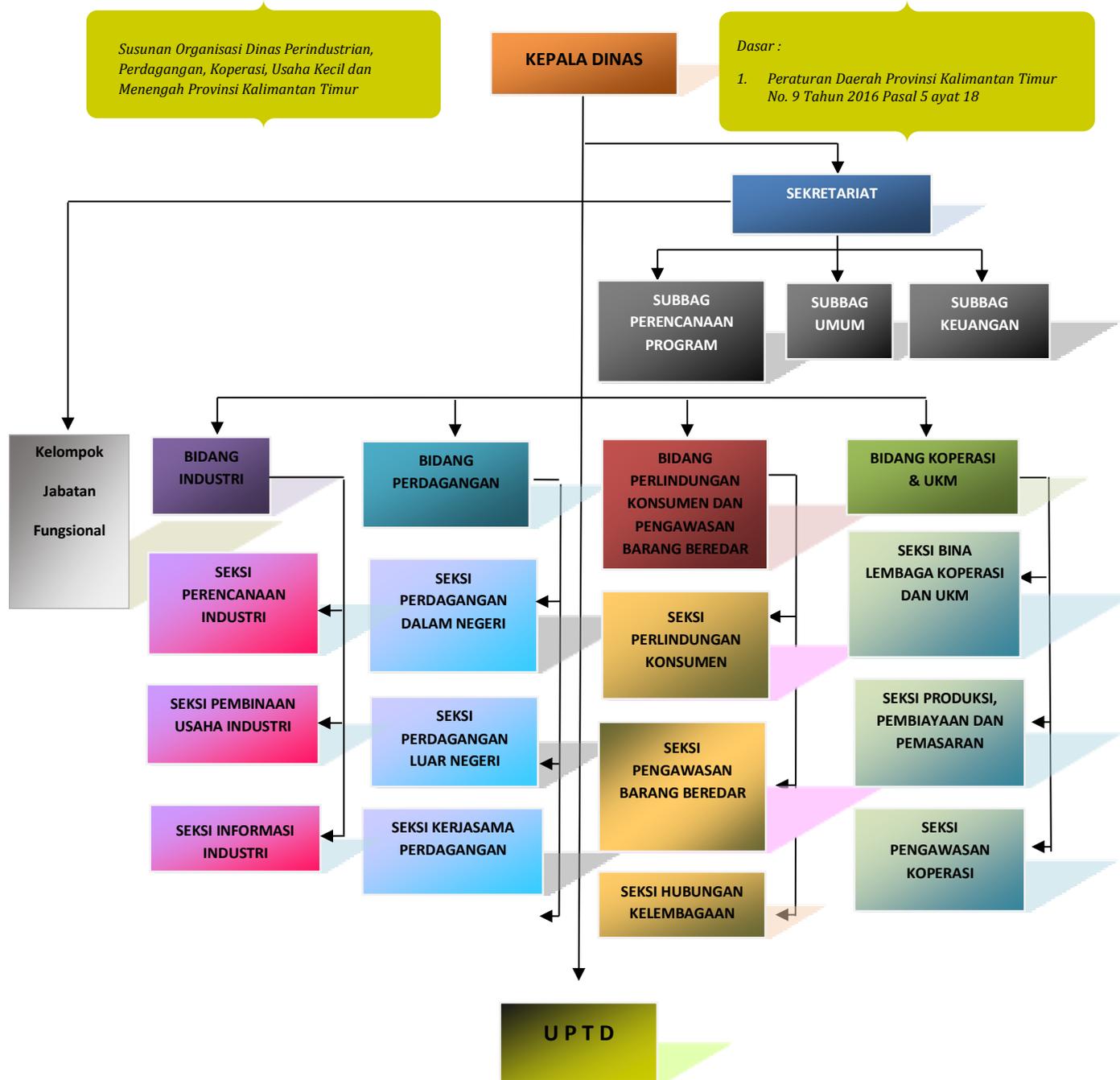
Fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang industri;

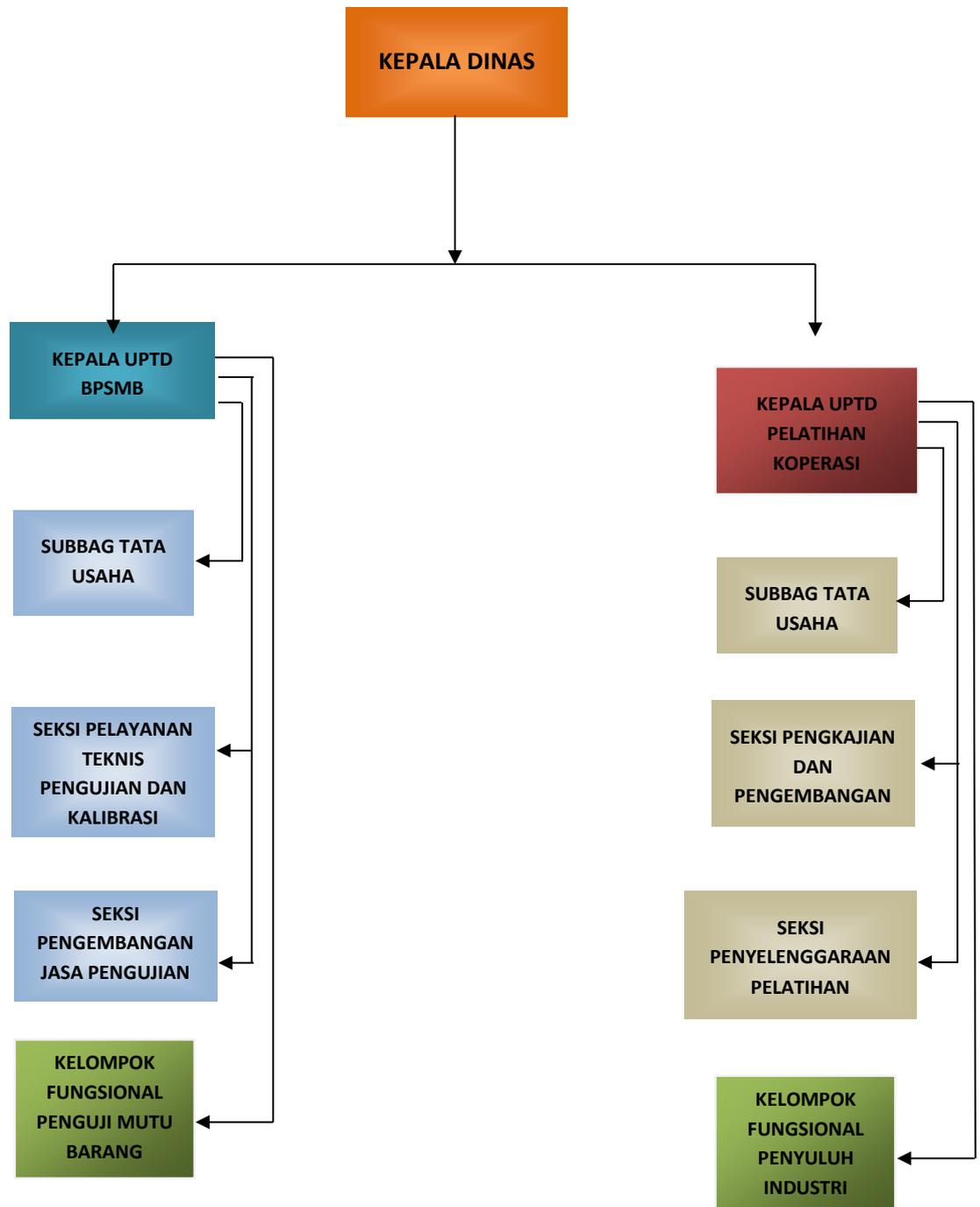
- e) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- f) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- g) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang koperasi dan UKM;
- h) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- i) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- j) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris Dinas, 4 (empat) Bidang dan 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini:

Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas



Bagan 2. Struktur Organisasi UPTD



B. SUMBER DAYA MANUSIA

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang ada di Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Desember tahun 2019 memiliki jumlah pegawai 100 orang dengan rincian sebagaimana dalam tabel 1.

Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dilihat dari tingkat pendidikan serta pelatihan teknis maka kualitas SDM tersebut telah sesuai dengan kebutuhan dan berkualitas, hal ini terlihat bahwa 10,00% berpendidikan S2 dan 43,00% SDM aparat Indagkop berpendidikan S1, sedangkan yang berpendidikan D3 (Sarjana Muda) 10,00% dan 33,00% berpendidikan SLTA, dengan golongan ruang/pangkat 74,00% adalah Penata dan 12,00% adalah Pembina sedangkan sisanya 14,00% Pelaksana.

Tabel 1.1 Keadaan Umum Pegawai Disperindagkop & UKM Prov. Kaltim Per 31 Desember 2019

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Pria	Wanita	I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	Diploma	Sarjana	Pasca Srjn
Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Sekretariat	7	5	-	50	18	1	1	2	9	1	9	2
Bid. Industri	9	5	-	-	14	2	-	-	5	-	9	2
Bid. PKPB	6	3	-	-	6	1	-	-	0	1	5	0
Bid. Perdagangan	7	5	-	-	10	2	-	-	6	1	3	2
Bid. Koperasi	7	5	-	1	12	2	1	-	8	1	4	1
UPTD BPSMB	10	10	1	1	12	2	1	-	9	2	3	1

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Pria	Wanita	I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	Diploma	Sarjana	Pasca Srgn
UPTD Pel. Koperasi	7	3	-	2	7	1	-	-	3	-	6	11
Jumlah PNS	64	36	1	13	74	12	3	1	33	10	43	10
Jumlah Honor/PTT	72	28	0	0	0	0	0	3	35	3	50	0
Jumlah PNS + Honor/PTT	136	64	1	9	85	11	6	4	68	13	93	10

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Agar dapat memprioritaskan kegiatan dalam berorganisasi, maka perlu diperhatikan beberapa aspek strategis dalam menjalankan suatu organisasi, diantaranya :

1. Adaptasi atas perubahan lingkungan strategik

Reformasi membawa konsekuensi logis adanya perubahan paradigma pemerintahan dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat. Untuk merespon tuntutan tersebut diperlukan adanya penyesuaian terhadap lingkungan strategik, sehingga instansi akan mudah untuk menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat.

2. Pengelolaan keberhasilan

Untuk mewujudkan keberhasilan organisasi diperlukan indikator keberhasilan disertai dengan target terukur yang harus dicapai, hal ini dalam rangka untuk membimbing organisasi agar tidak salah arah dan tepat sasaran.

3. Orientasi ke masa depan

Dalam berorganisasi, perlu adanya orientasi ke depan guna menambah pengetahuan / masukan agar dapat memperhitungkan apa yang perlu dilakukan kedepan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

4. Menentukan rencana program utama yang akan dicapai sesuai target yang telah ditetapkan selama kurun waktu tertentu. Berdasarkan target yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan, sasaran Dan program utama beserta indikator-indikator kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu yang telah ditetapkan.
5. Pelayanan prima
Salah satu indikator keberhasilan suatu instansi ditentukan seberapa besar instansi tersebut mampu mewujudkan pelayanan primanya kepada masyarakat.

D. Permasalahan Utama (Isu Strategis) Tahun 2019

1. Bidang Industri

Perkembangan industri di Kalimantan Timur sendiri mengalami pasang surut, yang diakibatkan oleh pola kebijakan ekonomi makro nasional maupun internasional. Salah satu sektor industri andalan diluar migas dan tambang yang selama ini menjadi komoditas utama Kalimantan Timur adalah sektor hutan. Hal ini memang sangat memungkinkan, mengingat 60 persen wilayah Kalimantan Timur adalah hutan. Namun seiring waktu berjalan, luas wilayah hutan daerah ini semakin mengecil yang diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah aktivitas tambang batubara yang semakin tinggi beroperasi di wilayah Kalimantan Timur.

Sektor industri lokal berbasis komoditi unggulan di Kalimantan Timur sampai hari ini belum memberikan kontribusi yang begitu signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah. Kondisi demikian dikarenakan sektor industri kita sangat lemah, baik dalam hal teknologi, kapasitas produksi dan kemampuannya untuk bersaing dengan industri asing. Disamping itu, sektor industri lokal Kalimantan Timur juga tidak memiliki platform kerakyatan, yakni sebagai penopang utama bagi kesejahteraan rakyat, melainkan berplatform kapitalisme atau ambil untung saja tanpa pertimbangan pembangunan segala bidang yang berkelanjutan (*suistanable development*). Kekayaan alam Kalimantan Timur, terutama

di sektor tambang minyak, batubara dan gas, tidak mampu menopang secara optimal pertumbuhan industri lokal.

Pembangunan industri berbasis komoditi unggulan yang akan menghasilkan produk unggulan di Provinsi Kalimantan Timur harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pembangunan industri akan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur dan pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi optimal serta pemerataan kesejahteraan akan terwujud. Permasalahan pembangunan industri provinsi menjadi salah satu rujukan penting dalam merumuskan program prioritas pembangunan industri di provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan analisis permasalahan pembangunan industri Provinsi Kalimantan Timur, maka diketahui terdapat enam permasalahan utama pembangunan industri di Kalimantan Timur, yaitu :

- 1) Ketergantungan yang besar terhadap sumber daya alam *unrenewable* (tidak dapat diperbaharui) dalam mengembangkan sektor industri Provinsi Kalimantan Timur.
- 2) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur penunjang pembangunan industri.
- 3) Belum optimalnya pengelolaan sumber daya untuk menghasilkan produk bernilai tambah.
- 4) Pertumbuhan dan jumlah tenaga kerja lokal sektor industri yang relatif masih rendah.
- 5) Pertumbuhan ekspor sumberdaya alam *renewable* yang masih rendah.
- 6) Perkembangan kawasan industri yang belum optimal.

2. Bidang Perdagangan.

Secara normative Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang *Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan*

Menengah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan utama, antara lain:

a. Terbatasnya Ekspor komoditi dan produk non migas non batubara.

Sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk merubah struktur PDRB dari komoditi primer berbasis migas dan batubara, maka diperlukan upaya-upaya untuk mempersiapkan komoditi non migas non batubara yang menjadi unggulan Kaltim. Dari data potensi pengembangan komoditi di Kaltim, maka Kalimantan Timur punya potensi untuk dikembangkan komoditi perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Akan tetapi potensi tersebut belum dikembangkan dan dikelola secara optimal sehingga masih mengalami keterbatasan dalam jenis diversifikasi komoditinya. Komoditi-komoditi di sektor perkebunan, perikanan dan kehutanan masih diekspor dalam bentuk bahan mentah dan belum merupakan proses industri yang apabila dikembangkan di Kaltim maka akan menjadi nilai tambah tersendiri dalam peningkatan perekonomian Kaltim misalnya perluasan kesempatan kerja, penguatan sektor hulu sebagai bahan baku industri, meningkatnya investasi di Kaltim dan lain-lain.

b. Rendahnya daya saing produk yang dipasarkan

Era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini mendorong persaingan semakin ketat. Berbagai negara terus berupaya meningkatkan daya saing produknya agar produk-produknya lebih efisien dan laku di pasaran. Untuk meningkatkan daya saing antara lain ditempuh beberapa langkah baik peningkatan efisiensi, menekan biaya produksi, perbaikan iklim usaha, perbaikan infrastruktur serta mengurangi berbagai bentuk pungutan.

Kurang kondusifnya lingkungan usaha juga memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama sektor-sektor industri sebagai lapangan kesempatan kerja yang merupakan salah

satu motor bagi pertumbuhan ekonomi. Lemahnya daya saing produk ekspor dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas dirasakan masih menjadi tugas Pemerintah Provinsi Kaltim untuk merumuskan berbagai kebijakan dan program di semua sektor untuk Bersama-sama bersinergi untuk mendorong penciptaan komoditi unggulan Kaltim yang berdaya saing.

c. Belum optimalnya pemanfaatan peluang Ekspor langsung di Kalimantan Timur.

Beberapa fasilitas yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim di antaranya adalah penyiapan pelabuhan Teluk Balikpapan sebagai pelabuhan ekspor langsung. Akan tetapi fasilitas ini belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh eksportir untuk dapat mengekspor komoditinya secara langsung dari Pelabuhan Teluk Balikpapan langsung ke negara tujuan ekspor. Belum semua pelaku eksportir komoditi potensial menggunakan export langsung. Masih banyak eksportir yang mengirimkan komoditinya ke luar daerah dan baru melakukan ekspornya melalui pelabuhan ekspor di luar daerah tersebut. Sehingga Kaltim kehilangan potensi pendapatan daerah dari pajak ekspor.

Hal ini tentu saja diakibatkan dari belum adanya regulasi yang mendorong atau mewajibkan untuk komoditi asal Kaltim yang diekspor, harus memanfaatkan fasilitas ekspor langsung melalui Teluk Balikpapan.

Selain itu peran aktif Pemerintah Kabupaten Kota juga sangat menentukan bagi keberhasilan kebijakan ekspor langsung ini. Pemerintah Kabupaten Kota belum memberikan dukungan dalam memanfaatkan Teluk Balikpapan sebagai Pelabuhan ekspor komoditi langsung.

Pelabuhan Teluk Balikpapan selain dikembangkan sebagai Pelabuhan Ekspor Langsung, juga mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai pelabuhan penghubung (hub) akses komoditi dari

antar pulau/provinsi potensial ke Pelabuhan Teluk Balikpapan. Beberapa daerah yang berpotensi menjadi konektivitas dengan Pelabuhan Teluk Balikpapan adalah Sulawesi, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan lain-lain. Saat ini konektivitas tersebut masih sangat terbatas karena belum adanya kebijakan dan regulasi terkait pemanfaatan pelabuhan Teluk Balikpapan sebagai hub komoditi antar daerah.

Belum berkembangnya mitra baru untuk meningkatkan pelayaran ekspor langsung juga masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini. Hal ini disebabkan beberapa perusahaan pelayaran harus memperhitungkan biaya untuk sekali kirim ekspor dan untuk kembalinya harus ada komoditi yang diangkut (jangan sampai kosong). Sehingga perusahaan pelayaran yang melayani ekspor langsung melalui Teluk Balikpapan masih terbatas.

Belum berkembangnya jasa pelayanan penunjang kelancaran distribusi peti kemas di kawasan Teluk Balikpapan seperti sarana infrastruktur jalan, SPBU dan lain-lain masih terbatas. Misalnya saja akses jalan dari Samarinda menuju Pelabuhan Teluk Balikpapan masih rawan dan kurang memadai. Sehingga program pembangunan infrastruktur Samarinda Balikpapan perlu mendapatkan perhatian agar mobilisasi kontainer dari Samarinda dapat dilaksanakan lancar menuju Teluk Balikpapan.

d. Terbatasnya jangkauan pemasaran komoditi dan produk ekspor

Pemasaran komoditi ekspor Kaltim tentu tidak terlepas dari upaya promosi dan publikasi. Selain itu Pemanfaatan Informasi dan Teknologi yang masih terbatas untuk mendorong produk UKM potensial ekspor juga masih menjadi kendala sehingga pemasaran produk UKM kebanyakan masih lokal. Terbatasnya promosi dalam dan luar negeri melalui kurasi dan pendampingan belum banyak dikembangkan sehingga even promosi masih terkesan kurang tepat sasaran dan kurang optimal pemanfaatannya.

e. Terbatasnya produksi dan sarana distribusi bahan pokok;

Masih tergantungnya Kalimantan Timur dalam penyediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dari luar daerah. Hal ini mengakibatkan semakin tingginya harga barang kebutuhan pokok dan rentannya ketersediaan stok barang kebutuhan pokok. Dan bahkan menjelang hari besar keagamaan, harga barang kebutuhan pokok bisa mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini disebabkan sistem perdagangan dalam daerah yang belum efisien dari aspek tatalaksana, langkah/upaya khusus dalam bentuk penetrasi pasar masih terbatas, regulasi di daerah masih terbatas dalam upaya mengatur tata niaga bahan pokok, dan koordinasi sinkronisasi yang belum optimal. Banyak Distributor, Sub Distributor dan Agen yang belum melakukan kewajiban daftar, sehingga data ketersediaan stok bahan pokok masih terbatas. Dukungan sektor terkait juga dirasakan masih kurang khususnya terkait optimalisasi dan juga peningkatan teknologi budidaya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dalam daerah di Kaltim dalam mewujudkan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan pengendalian harga. Selain itu dukungan infrastruktur antar wilayah di Kaltim juga masih menjadi kendala sehingga tingkat disparitas harga barang kebutuhan pokok di kaltim masih relative tinggi.

Belum berkembangnya kemitraan dan Kerjasama antar daerah dalam peningkatan neraca perdagangan antar pulau dan pemenuhan bahan pokok. Masih terbatasnya jenis dan jumlah komoditi yang dikerjasamakan perdagangannya juga perlu mendapatkan perhatian bagaimana ke depannya untuk bisa melakukan identifikasi potensi komoditi unggulan yang dapat dikembangkan menjadi komoditi perdagangan antar pulau sehingga mampu menjadi peluang pasar bagi produk Kaltim misalnya handycraft, hasil perikanan, hasil perkebunan dan lain-lain. Selain itu kerjasama perdagangan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat Kaltim juga belum optimal dilaksanakan.

3. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu barang (BPSMB)

Isu dan Masalah Mendesak :

a. Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Jumlah SDM PNS baik tenaga teknis laboratoris (Tenaga Fungsional Penguji Mutu Barang) maupun tenaga administratif (Pelaksana) belum sesuai dibandingkan bahan kerja yang ada.

Untuk mengatasinya telah dilakukan :

- 1) Pengekrutan Tenaga Non PNS baik sebagai tenaga teknis maupun tenaga non teknis.
- 2) Membuat Analisis Beban Kerja untuk mengusulkan tenaga CPNS agar beban kerja yang ada dapat dilaksanakan oleh SDM PNS sesuai tugas dan fungsinya.

b. Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi :

1) Pelayanan Pengujian

Ruang lingkup pengujian yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelanggan dikarenakan :

- Ruang lingkup yang telah diakreditasi terhadap Laboratorium Pengujian seperti komoditi Lada Putih dan Biji Kakau langsung dijual antar pulau oleh pelaku usaha tanpa memperhatikan mutu komoditi.

Informasi ini didapatkan berdasarkan hasil identifikasi potensi layanan pengujian di sentra Komoditi Lada Putih dan Biji Kakao di kabupaten Kukar, Kutim dan PPU.

- Pelaku Usaha produk Crude Palm Oil (CPO) menginginkan UPTD BPSMB dapat memberikan pelayanan bukan hanya sebagai laboratorium pengujian tetapi dapat sebagai Lembaga Surveyor, Informasi ini didapatkan berdasarkan hasil Pertemuan Teknis yang diprakarsai oleh UPTD BPSMB Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur bersama instansi teknis terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur dengan beberapa Pelaku Usaha CPO yang dilaksanakan di Samarinda tahun 2018.

- Mengembangkan ruang lingkup pengujian lain dan akreditasinya yang disesuaikan dengan permintaan potensi pasar antara lain : Beras dan Minyak Goreng.

2) Pelayanan Kalibrasi.

Ada beberapa ruang lingkup dan kapasitas yang belum dikembangkan akreditasinya sesuai permintaan pelanggan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan baik pemerintah maupun swasta diperlukan akreditasi terhadap ruang lingkup anatara lain : Thermohyrometer, Tekanan, Gaya dan Aliran.

4. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

- a. Masih rendahnya kapasitas usaha koperasi yang bergerak di sektor riil.

Koperasi mempunyai peran strategis dalam perekonomian daerah. Dalam perkembangannya terdapat beberapa permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan yang dimaksud adalah jumlah koperasi yang mengembangkan produk unggulan masih sangat sedikit, akibatnya kinerja koperasi disektor riil masih belum banyak memberikan kontribusi bagi perekonomian Kalimantan Timur. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan lebih dapat berkonsentrasi dalam upaya pengembangan koperasi disektor riil. Upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan produk khas unggulan Provinsi Kalimantan Timur yang dikelola oleh lembaga koperasi.

- b. Lemahnya Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dibutuhkan upaya peningkatan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Upaya dilakukan dengan memanfaatkan secara maksimal manajemen dan teknologi. Pelaku

UKM dapat memanfaatkan fasilitas pembinaan yang ada, baik dari pemerintah maupun dari sektor swasta, guna terciptanya UKM yang berdaya saing. Melalui fasilitasi pembinaan pelaku UKM diharapkan dapat mewujudkan UKM yang dimiliki kompetensi dalam memproduksi produk dan jasa.

UKM juga berperan sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan ekonomi dan ekspor non migas yang secara langsung dapat menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat. Secara mikro ekonomi, keberadaan UKM sangat fluktuatif, hal ini dapat terjadi karena pergeseran sektor usaha guna mengikuti pangsa pasar yang ada atau karena memiliki struktur permodalan yang belum mapan. Kondisi tersebut menjadikan posisi UKM sangat sulit untuk mapan. Keberadaan UKM yang fluktuatif ini yang menuntut agar terus dilakukan kegiatan pendataan UKM by name by address.

Berbagai keterbatasan yang dihadapi UKM, dimana salah satunya adalah keterbatasan UKM dalam mengakses pasar. Oleh karena itu, perkembangan dan pembinaan UKM lebih diarahkan untuk mengakses pasar dengan terus memperkuat kualitas, kuantitas dan kontinuitas untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik, nasional dan internasional.

5. Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar

Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksudkan dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Undang-Undang tersebut sudah 20 (dua puluh) tahun keberadaannya, tetapi konsumen belum banyak mengetahui dan memahaminya, hingga masalah utama konsumen saat ini adalah :

- Tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah.
- Kepatuhan pelaku usaha masih rendah.
- Kompleksitas peredaran barang dan jasa.

- Semakin luas pilihan produk dan jasa.
- Meningkatkannya informasi yang berlebihan.
- Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) belum maksimal.

Upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman konsumen tentu sangat penting agar konsumen mampu membuat pilihan dan keputusan yang tepat dalam mengkonsumsi dan menggunakan barang serta memanfaatkan jasa sesuai ketentuan.

Selanjutnya pengawasan barang beredar dan jasa dimaksudkan untuk menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam memperdagangkan barang dan jasa baik produk dalam negeri maupun produk import sesuai ketentuan.

Melalui kegiatan Edukasi Konsumen Cerdas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaku usaha dan pelajar SLTA dan juga pengawasan barang beredar dan jasa serta pengawasan perdagangan di beberapa kabupaten kota se Kalimantan Timur, selain itu dengan meningkatkan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang ada di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai, diharapkan akan meningkatkan pemahaman terhadap hak konsumen akan informasi yang benar, jelas dan jujur dari pelaku usaha yang bertanggung jawab serta mampu menjadi agen perubahan dan penentu ekonomi daerah kedepannya.

VI SI : "Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat

Misi II : Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1 Meningkatnya Kontribusi Sektor Perindustrian dalam Perekonomian Daerah	1 Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan.	kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB(%)	Pengembangan industri diarahkan pada potensi sumber daya alam yang berbasis komoditi Kelapa Sawit, Kayu, dan Karet melalui pengembangan kawasan dan sentra, serta regulasi yang mendorong pengembangan industri;
			Peningkatan pengembangan industry kecil menengah diarahkan pada peningkatan iklim investasi melalui fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi serta dukungan semua pihak;
			Peningkatan kompetensi SDM diarahkan pada program kesesuaian kebutuhan, melalui pendidikan dan pelatihan, serta kerjasama perusahaan yang membutuhkan;
			Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus akan diarahkan pada upaya hilirisasi melalui percepatan penataan kelembagaan, SDM, dan Infrastruktur dan secara simultan mendorong pemungisian peran kawasan industry;
			Pengembangan kelembagaan industry diarahkan pada terpenuhinya dukungan regulasi, pelayanan perizinan, dan kebutuhan investasi;
			Peningkatan standardisasi produk diarahkan pada upaya penerapan dan pengawasan, serta pembinaan kepada IKM;
			2 Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing komoditi dan ekspor non migas
Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan kerjasama perdagangan diarahkan pada kerjasama antar daerah, pengembangan mitra bisnis, dan pengembangan pelaku produk export;		
Mewujudkan sistem distribusi yang	Pengendalian inflasi dan stabilisasi kebutuhan barang pokok penting dilakukan melalui fasilitasi dorongan pengembangan potensi daerah		

VI SI : "Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat			
Misi II : Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		efisien	<p>pengembangan akses dan logistic penerapan harga acuan, penataan perdagangan</p> <p>peningkatan penetrasi pasar, koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan kebutuhan bahan pokok penting</p>
	3 Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen.	Menurunnya peredaran barang dan/ atau jasa yang tidak sesuai ketentuan	<p>Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan barang diarahkan pada perlindungan hak konsumen</p> <p>pengembangan cinta produk Indonesia diarahkan pada peningkatan kesadaran konsumen, pelaku usaha, komunitas dan generasi muda serta penerapan pelaksanaan aturan dan pengawasan, dengan melibatkan semua pihak terkait, BPSK dan LPKSM serta masyarakat luas;</p>
2 Meningkatkan ekonomi kerakyatan	4 Peningkatan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM Sektor Produksi	Pemberdayaan Pengembangan Koperasi dan UKM yang berdaya saing mandiri dan sehat untuk pertumbuhan perekonomian daerah	<p>Pengkatan Kelembagaan Koperasi dan UKM diarahkan pada upaya peningkatan Jumlah RAT, peningkatan keterpaduan, pembinaan dan pengawasan, serta pelatihan manajemen;</p> <p>Peningkatan kompetensi wirausahawan diarahkan pada peningkatan kapasitas UKM melalui pelatihan dan pendidikan;</p> <p>Peningkatan kemandirian UKM diarahkan pada pembentukan usaha kecil menengah menengah yang kondusif melalui penguatan, optimasi pemanfaatan akses permodalan, pendampingan, pengelolaan dan legalitas formal dan perlindungan</p> <p>Peningkatan daya saing UKM diarahkan pada kewirausahaan dan keunggulan kompetitif melalui melalui fasilitasi, dorongan pengembangan kreasi/inovasi, pengembangan produksi, peningkatan pasar dan akses informasi dan pemanfaatan teknologi;</p>

E. SARANA DAN PRASARANA KERJA

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2 Peningkatan Sarana Prasarana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	Tanah	29.767	m ²
2	Bangunan Gedung	7.617	m ²
3	Listrik	2	Jaringan
4	Air	1	Jaringan
5	Telepon	7	Line (1 fax)
6	Area Parkir	2	Area
7	Ruang Rapat	2	Ruang
8	Ruang Arsip	3	Ruang
9	Koperasi	1	Buah
10	Taman Dalam	1	Area

Sumber data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Sebagai langkah-langkah untuk mencapai visi dan misi Kalimantan Timur 2019-2023, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara terus menerus melakukan inovasi-inovasi baru untuk menciptakan peluang dalam peningkatan disektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur memiliki beberapa tujuan dan sasaran disertai dengan indikator pengukurannya yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan strategik dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran merupakan tujuan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tertentu, bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang fokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Adapun, tujuan, sasaran beserta indikator kinerjanya, serta program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilengkapi pula dengan target tahunannya disampaikan pada tabel terlampir :

Tabel 2.1. Target Kinerja Sasaran Tahun

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. Th. 2019	Target Kinerja Sasaran Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah	Kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah terhadap PDRB	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan	kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)	persen	18.01%	20%	20%	20%	21%	21%
		Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing komoditi dan ekspor non migas	Nilai ekspor non migas (Milyar dollar)	milyar	12,96 M U\$D	14.5 m m U\$D	15.2 m U\$D	15.9 m U\$D	16.7 m U\$D	17.6m U\$D
			Disparitas harga antar wilayah (%)	persen	13.12%	20%	20%	20%	19%	19%
		Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen.	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	persen	38.4	30	33	36	39	42
Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM	Persentase sumbangan Koperasi dan UKM Terhadap PDRB	Peningkatan usaha ekonomi Koperasi dan UKM sektor Produksi	Koperasi Unggulan	koperasi	16	10	10	10	10	10
			UKM Unggulan	UKM	41	25	30	35	40	45
			persentase sumbangan PDRB sektor koperasi dan UKM	persen	15.07	4.40	4.50	4.60	4.70	4.80

Tabel 2.2 Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	3	4	5	6	7	
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perindustrian dalam Perekonomian Daerah	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	persen	Program Penataan struktur industri	Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu hingga ke Hilir
						Pengembangan Sistem Data dan Informasi Industri Daerah
					Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	Koordinasi peningkatan dan pengembangan industri
2	Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas	Nilai ekspor non migas	milyar	Program Peningkatan dan pengembangan ekspor	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
						membangun jejaring dengan eksportir
						Koordinasi Program Pengembagnan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha
			Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan	Kordinasi Pengelolaan Isu-Isu Perdagangan		
		Disparitas harga antar wilayah	persen	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	
					Peningkatan sistem & jaringan informasi perdagangan	

Tabel 2.2 Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
	1	3	4	5	6	7
3		Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	persen	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
						Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
						Kegiatan Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen
4	Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Peningkatan usaha ekonomi Koperasi dan UKM sektor Produksi	Koperasi Unggulan	Koperasi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi
						Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
						Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi (DAK)
			UKM Unggulan	UKM	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Kegiatan Pengembangan Produksi dan Akses Usaha Kecil Menengah
		Persentase sumbangan Koperasi dan UKM Terhadap PDRB	%	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Meneingah	

Tabel 2.2 Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
	1	3	4	5	6	7
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Pelatihan KUMKM
						Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan KUMKM

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan unsur penting dalam pengukuran kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam rencana strategik, adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2019-2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan	1. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	Berdasarkan laporan dinas dan perhitungan BPS	Berdasarkan data BPS, Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten/Kota dan Provinsi	Kepala Dinas
2	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas	2. Nilai ekspor non migas	BPS dan Bank Indonesia	Berdasarkan data BPS, Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten/Kota dan Provinsi	Kepala Dinas
		3. Disparitas harga antar wilayah	Harga di Provinsi / harga Kab Kota	Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten/Kota dan Provinsi	Kepala Dinas
3	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	4. Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Survey Keberdayaan Konsumen Kalimantan Timur	Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten/Kota dan Provinsi	Kepala Dinas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
4	Peningkatan usaha ekonomi Koperasi dan UKM sektor Produksi	5	Koperasi Unggulan	Berdasarkan laporan data pemeringkatan, penilaian kesehatan dan RAT Koperasi	SKPD terkait, Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kepala Dinas
		6	UKM Unggulan	Berdasarkan laporan data pemeringkatan, penilaian kesehatan.	BPS, Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kepala Dinas
		7	Persentase sumbangan Koperasi dan UKM Terhadap PDRB	Berdasarkan data BPS	BPS, Dinas Perindagkop dan UMKM Prov dan Kabupaten/ Kota	Kepala Dinas

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program /kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Diharapkan melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	persen	20%
2	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas	Nilai ekspor non migas	milyar US\$	14.5
		Disparitas harga antar wilayah	persen	20%
3	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	persen	30
4	Peningkatan usaha ekonomi Koperasi dan UKM sektor Produksi	Koperasi Unggulan	Koperasi	10
		UKM Unggulan	koperasi	25
		Persentase sumbangan Koperasi dan UKM Terhadap PDRB	persen	4.5

1. Rencana Anggaran Tahun 2019

Pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar **Rp. 55.820.551.500,-** dengan rincian Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 24.098.270.500,- dan Belanja Langsung Rp. 31.722.281.000,- dan mengalami perubahan dalam Anggaran Perubahan APBD menjadi sebesar **Rp. 50.424.740.716,-** dengan rincian Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 18.464.459.716,- dan Belanja Langsung Rp. 31.960.281.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar **Rp. 43.020.234.676,- (83,22%)** dengan rincian untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 13.922.535.056,- (75,40%) dan Belanja Langsung (BL) Rp. 29.097.699.620,- (91,04%).

2. Target Belanja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019

Tabel 2.5 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2019

No	Uraian	Tahun Anggaran 2019		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	18.464.459.716	13.922.535.056	75.40
2	Belanja Langsung	31.960.281.000	29.097.699.620	91.04
	Jumlah	50.424.740.716	43.020.234.676	83,22

3. Alokasi Anggaran Per sasaran Strategis

Anggaran Belanja Langsung (BL) Tahun 2019 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Presentase	Keterangan
1	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan	3,230,800,000	97.35%	
2	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas	6,545,900,000	97.35 %	
3	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	2,150,000,000	86.30 %	
4	Peningkatan usaha ekonomi Koperasi dan UKM sektor Produksi	16,868,695,000	69.80%	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2017	Nilai 2018
1	2	3	5	6
1	Perencanaan Kinerja	30%	21,96	22,32
2	Pengukuran Kinerja	25%	20,31	21,25
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,04	12,31
4	Evaluasi Kinerja	10%	7,31	6,03
5	Capaian Kinerja	20%	10,39	12,88
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	72,01	74,79
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

2. Tidak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.

Tabel 3.2 Tidak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	RENCANA AKSI
1	Perencanaan Kinerja		
	a. Target kinerja disempurnakan ditetapkan dengan baik, menggunakan perhitungan yang terukur dan memadai :	Telah dilakukan penyempurnaan penetapan target kinerja melalui penyusunan Renstra 2019 - 2023	Menetapkan Renja 2020 dan melakukan penyempurnaan target kinerja sebagai breakdown dari Renstra 2019 - 2023 dan mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2020.

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	RENCANA AKSI
	b. Program dan kegiatan ditingkatkan sinkronisasinya dengan sasaran IKU sehingga program dan kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran IKU	Telah dilakukan sinkronisasi program melalui penyusunan Renstra 2019-2023, dimn dlm penyusunannya tlh dilakukan pendampingan oleh akademisi melalui fasilitasi BAPPEDA Prov. Kaltim	Menetapkan Renja 2020 sebagai breakdown dari Renstra 2019-2023 dengan program yang sinkron dengan IKU, dan akan dilaksanakan mulai Januari 2020.
	c. Mengalokasikan anggaran yang memadai atas program dan kegiatan yang ditetapkan	Mengusulkan Alokasi anggaran yg memadai, namun juga perlu dipertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Diupayakan efisiensi dana namun IKU tetap tercapai.	Melaksanakan kegiatan sesuai anggaran yang telah disetujui dengan disyahkannya RPA/DKA tahun anggaran 2020.
	d. Dokumen PK diselaraskan dengan RPJMD/Renstra	Melalui penyusunan RPJMD/Renstra tahun 2019-2023 yang baru, telah disusun PK yang selaras.	Menetapkan PK tahun 2020 yang selaras dengan Renstra/Renja dan dapat segera dilaksanakan pada bulan Januari sampai Desember tahun 2020.
	e. Dokumen PK disempurnakan dengan membuat hal-hal yang harus ditetapkan dalam kontrak kinerja/tupoksi	PK telah dibuat menyesuaikan dengan nomenklatur jabatan yang diemban, yang itu juga merupakan tupoksi pejabat yang bersangkutan.	Menetapkan PK yang merupakan gambaran Tupoksi pejabat yg bersangkutan telah termaktub dlm Renja OPD dan siap dilaksanakan pd bulan Januari 2020.
	f. Menggunakan dokumen renstra sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana kerja anggaran.	Renstra telah menjadi pedoman dalam penyusunan RKA, namun dalam perkembangannya tetap menyesuaikan dengan kondisi ketika kegiatan tsb dilakukan.	Menyusun RKA tahun 2020 yang sesuai dg Renstra dan telah disyahkan utk dilaksanakan di tahun 2020.
	g. Target kinerja yang diperjanjikan diperjelas sehingga dapat dijadikan untuk mengukur keberhasilan	Target Kinerja dlm perjanjian telah memenuhi ketentuan indikator yang terukur untuk dijadikan pengukuran keberhasilan.	Menetapkan target kinerja yang jelas dan terukur dalam RKA dan Renja 2020

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	RENCANA AKSI
	h. Dilakukan monitoring terhadap rencana aksi atas pelaksanaan kinerja	Meskipun monitoring telah dilakukan sejak lama, namun pelaksanaannya kurang maksimal, sehingga di tahun 2020 akan dimaksimalkan.	Tahun 2020, melaksanakan monitoring sejak Januari, meskipun blm semua, masih mengambil sampel beberapa kegiatan utamanya kegiatan prioritas.
	i. Rencana aksi dimanfaatkan sebagai arah pengorganisasian kegiatan	Akan dilakukan koordinasi untuk memperoleh informasi terkait memanfaatkan rencana aksi sebagai arah pengorganisasian kegiatan.	Melakukan koordinasi mulai bulan Januari 2020.
	j. Perjanjian kinerja dimanfaatkan sedemikian rupa untuk mengidentifikasi kinerja sampai eselon III dan IV	Secara umum telah dimanfaatkan, namun belum secara khusus memberikan reward atau punishment terhadap kinerja eselon III dan IV.	Kedepan, secara bertahap bisa dijadikan pertimbangan dalam memberikan reward berupa promosi jabatan dan sebagainya.
2	Dalam dokumen pelaporan kinerja untuk penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi, agar menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber dana	Dlm pelaporan sebelumnya telah ditetapkan analisis efisiensi penggunaan sumber dana.	Akan menetapkan kembali analisis tersebut untuk melihat efisiensi dana terhadap capaian kinerja.
3	Evaluasi Kinerja Internal		
	Kualitas Evaluasi :		
	a. Evaluasi program memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan	Melakukan perbaikan program/kegiatan di Renstra 2019-2023.	Tahun 2020 akan dilakukan kembali evaluasi lebih mendalam untuk perbaikan jika ditemukan kekurangan pada review renstra 2021.
	b. Evaluasi program memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan.	Melakukan evaluasi program baik secara internal maupun dengan pihak lain untuk dijadikan acuan peningkatan kinerja di tahun 2020.	Melalui evaluasi yang dilakukan, di tahun 2020 telah dilakukan berbagai perbaikan program maupun indikatornya guna peningkatan kinerja

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	RENCANA AKSI
	c. Pemantauan rencana aksi memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan	Pada Renja 2020, kegiatan monev terhadap rencana aksi akan lebih dioptimalkan sehingga alternatif perbaikan dapat dilakukan.	Tahun 2020 akan melakukan kembali evaluasi lebih mendalam untuk perbaikan kembali jika ditemukan kekurangan
	d. Hasil evaluasi rencana aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata	Meningkatkan anggaran untuk kegiatan monev terhadap program/kegiatan bidang.	Tahun 2020 melakukan monev lebih mendalam dan rencana dilakukan mulai bulan Januari.
	Pemanfaatan Evaluasi		
	a. Hasil evaluasi program ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang	Meningkatkan anggaran untuk kegiatan monev terhadap program/kegiatan bidang.	Melakukan evaluasi program pada tahun berjalan terhadap keefektifannya dari Januari sampai dengan Desember.
	b. Hasil evaluasi rencana aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata	Meningkatkan anggaran untuk kegiatan monev terhadap program/kegiatan bidang.	Membuat laporan Evaluasi kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil langkah selanjutnya.
4	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi		
	Dalam pencaian kinerja yang dilaporkan (output) atau (outcome) agar informasi mengenai kinerja dapat diandalkan dan dilakukan perbaikan terhadap sasaran dan indikator kinerja yang kurang tepat dan belum menggambarkan hasil yang akan dicapai	Melakukan perbaikan program/kegiatan di Renstra 2019-2023 beserta indikator kinerjanya supaya lebih menggambarkan hasil yang dicapai.	Mengadakan sosialisasi LKj-IP kepada seluruh bagian. Diantaranya tentang pentingnya data yang handal/akurat sebagai dasar pengambilan keputusan.

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Dalam era globalisasi saat ini perkembangan industri dan perekonomian harus diimbangi oleh kinerja karyawan yang baik sehingga dapat tercipta dan tercapainya tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Salah satu persoalan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia (pegawai) dalam organisasi adalah mengukur kinerja pegawai. Pengukuran kinerja dikatakan penting mengingat melalui pengukuran kinerja dapat diketahui seberapa tepat pegawai telah menjalankan fungsinya. Ketepatan pegawai dalam menjalankan fungsinya akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Selain itu, hasil pengukuran kinerja pegawai akan memberikan informasi penting dalam proses pengembangan pegawai.

Berikut ini disampaikan capaian kinerja per triwulan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan indikator sasaran yang ditetapkan :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja per Triwulan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 1 TAHUN	TARGET TW 1	TARGET TW 2	TARGET TW 3	TARGET TW 4	REALISASI SMP TW 4	CAPAIAN (%)
1	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	Persen	20	0	0	0	20	17.77	88.85
<i>Aktifitas Kegiatan : Pembinaan dan koordinasi</i>										
Rata-rata capaian indikator sasaran Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan										88.85
2	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas	Nilai ekspor non migas	milyar	14.50	0	0	0	14.50	14.11	97.31
		Disparitas harga antar wilayah	Persen	20	0	0	0	20	13.80	152.44
<i>Aktifitas Kegiatan : Pembinaan, koordinasi dan promosi, pemantauan terhadap ketersediaan bahan pokok, penting dan monitoring harga.</i>										
Rata-rata capaian indikator sasaran Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas										173.53
3	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Persen	30	0	0	0	30	38.4	128
<i>Aktifitas Kegiatan : Koordinasi dan pemantauan terhadap ketersediaan bahan pokok, penting dan monitoring harga.</i>										

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 1 TAHUN	TARGET TW 1	TARGET TW 2	TARGET TW 3	TARGET TW 4	REALISASI SMP TW 4	CAPAIAN (%)
Rata-rata capaian indikator sasaran Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen										128
4	Peningkatan usaha ekonomi Koperasi dan UKM sektor Produksi	Koperasi Unggulan	koperasi	10	16	5	0	10	16	160
		UKM Unggulan	UKM	25	0	0	0	25	41	164.00
		Persentase sumbangan Koperasi dan UKM Terhadap PDRB	Persen	4.5	0	0	0	4.5	15.07	334.89
<i>Aktifitas Kegiatan : Koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi dan UKM</i>										
Rata-rata capaian indikator sasaran Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UKM										124.9
Rata-rata keseluruhan capaian indikator sasaran :			148.86							

C. Analisis Capaian Kinerja 2019

Capaian indikator pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2019 implementasinya mencakup pelaksanaan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan dalam 21 (dua puluh satu) program yang merupakan bagian dari 4 (empat) sasaran selama tahun 2019, maka dapat diuraikan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

☐ Sasaran I	:	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan
Dengan Indikator	:	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (%)

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran I pada tahun 2019 ini adalah 20%, dan realisasi tingkat capaian hasil pengukuran terhadap indikator tersebut sampai triwulan III sebesar 17,77%, sehingga persentase pencapaian indikator I sebesar 88.85 persen .

☐ Sasaran II	:	Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas
Dengan Indikator	:	1. Nilai ekspor non migas (Milyar dollar) 2. Disparitas harga antar wilayah (%)

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran II pada tahun 2019 ini adalah untuk indikator nilai ekspor non migas, ditetapkan targetnya sebesar US\$ 14.5 Milyar dan realisasi ekspor non migas sebesar US\$ 14.11 Milyar sampai bulan Desember, sehingga persentase pencapaian indikator sasarannya sebesar 97,31%.

Sedangkan untuk indikator sasaran disparitas harga antar wilayah ditetapkan targetnya sebesar 20% dan realisasi capaian indikator sasaran sebesar 13.12%, sehingga persentase pencapaian indikator sarannya sebesar 65,6%. Dimana presentasi perbedaan harga antar wilayah kab/kota semakin kecil maka semakin baik.

❑ Sasaran III	:	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen.
Dengan Indikator	:	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran III pada tahun 2019 adalah 30 dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh angka 38,4, sehingga pencapaian indikator sarannya sebesar 128 persen.

❑ Sasaran IV	:	Peningkatan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM Sektor Produksi
Dengan Indikator	:	1. Koperasi Unggulan 2. UKM Unggulan 3. persentase sumbangan koperasi terhadap PDRB

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran IV tahun 2019 adalah untuk Koperasi Unggulan sebesar 10 koperasi dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh angka 16 sehingga persentase pencapaian sarannya sebesar 160 persen.

Sedangkan untuk indikator UKM Unggulan sebesar 25 UKM dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut sebesar 41, sehingga persentase pencapaian indikator sarannya sebesar 164 persen.

Indikator ke tiga yaitu Persentase sumbangan koperasi dan UKM terhadap PDRB ditargetkan 4,5%, namun realisasinya 15,07%, sehingga capainnya sebesar 334,89%.

Secara umum pencapaian kinerja kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2019 dapat dikatakan sangat berhasil, baik dari sumber dana APBD untuk pembangunan sebanyak 21 (dua puluh satu) program, maupun dari sumber dana APBN/dana dekonsentrasi sebanyak 4 (empat) program. Secara rinci pengukuran kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

Tabel 3.4 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Peningkatan Kontribusi Lapangan Industri Pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	Persen	20	17.77	88.85
2	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas	Nilai ekspor non migas	milyar U\$D	14.5	14.11	97.31
		Disparitas harga antar wilayah	Persen	20	13.80	69.00
3	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Persen	30	38.4	128.00
4	Peningkatan usaha ekonomi Koperasi dan UKM sektor Produksi	Koperasi Unggulan	Koperasi	10	16	160
		UKM Unggulan	UKM	25	41	164
		Persentase sumbangan Koperasi dan UKM Terhadap PDRB	%	4.5	15.07	334.89
Rata-rata keseluruhan capaian indikator sasaran :				148.86		

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (2019) dengan dua tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017 dan tahun terakhir 2018;

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2019, 2018 dan 2017.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan
			2017	2018	2019	Tahun 2019
1	2	3	5	6	7	$7 = (6-5) / 5 * 100\%$
1	Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB	persen	19	18.44	17.77	-3.63
2	Peningkatan Jumlah Produk Unggulan Daerah yang Berkualitas	produk	7	6	0	-100.00
3	Nilai Ekspor Non Migas	US\$	12	13.79	14.11	2,32
4	Disparitas harga Antar Wilayah	persen	5	7	13,80	97,14
5	Jumlah Barang yang Tidak Sesuai Standar	buah	14	11	0	-100.00
6	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	nilai	0	0	38.4	0.00
7	Jumlah Koperasi Unggulan.	koperasi	30	61	16	-73.77
8	Presentase Penyerapan Tenaga kerja dan Investasi Sektor Koperasi dan UKM.	persen	68.85	68.85	0	-100.00
9	UKM Unggulan	UKM	0	0	41	0.00
10	Persentase Sumbangan PDRB Sektor Koperasi dan UKM.	persen	12.18	12.83	15.07	17.46
11	UKM yang Melaksanakan Kontak Dagang	UKM	60	210	0	-100.00
12	Jumlah Koperasi/UMKM yang Melakukan Kemitraan.	Kop/ukm	344	407	-	-100.00
13	Penumbuhan Jumlah WUB	WUB	1,200	1459	0	-100.00
14	Penumbuhan Jumlah Inkubasi UKM/WUB	WUB	155	325	0	-100.00

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (2019) dengan target jangka menengah (s.d 2023) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target jangka Menengah s.d 2023.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	21	17.77	-15.4
2	Nilai Ekspor non Migas	Milyar USD	17.6	14.11	-19.83
3	Disparitas Harga Antar Wilayah	Persen	19	13.80	-27.37
4	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Persen	42	38.4	-8.57
5	Koperasi Unggulan	Koperasi	50	16	-68.00
6	UKM Unggulan	UKM	45	41	-8.89
7	Persentase Sumbangan PDRB Sektor Koperasi dan UKM.	persen	4.8	12.83	167.3

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar nasional.

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini 2019 dengan Standar Nasional

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Realisasi Nasional	Ket.
			2019		(+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Kontribusi Industri terhadap PDRB	persen	18.44	20.16	+
2	Nilai Ekspor Non Migas	US\$ M	14.11	154.99	-
3	Disparitas Harga antar Wilayah	Persen	13.80	14.08	Disparitas harga rata-rata Kaltim dibandingkan dengan Harga rata-rata Nasional
4	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	Persen	38.4	40.41	-
5	Koperasi Unggulan	Koperasi	16	13	
6	Persentase Sumbangan PDRB Sektor Koperasi dan UKM.	persen	15.07	60.34	-

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

a. **Sasaran I** : Peningkatan kontribusi lapangan industri pengolahan.

Dengan Indikator sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%) dengan target 20 %, sampai dengan triwulan ke III realisasi capaian 17.77 %, berarti pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan dapat dicapai sebesar 88.85 %. Peran industri pengolahan migas masih dominan dalam komposisi kontribusi sektor industri terhadap PDRB, sekitar 60 % untuk migas, 40 % untuk non migas. Keadaan ini karena industri di Kalimantan Timur masih mengandalkan/ketergantungan yang besar terhadap sumber daya alam *unrenewable* (tidak dapat diperbaharui).

Alternatif solusi yang telah dilakukan dan tindak lanjut yaitu Peluang pada sektor pengembangan atau pengolahan sumberdaya alam diarahkan menjadi industri berbasis potensi daerah dilakukan dengan melakukan pembinaan pada industri kecil menengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sentra industri adalah salah satu upaya untuk mengembangkan potensi unggulan daerah dengan memberikan nilai tambah pada sumber daya lokal melalui teknologi industri. Pengelompokan industri kecil dan industri menengah dalam suatu Sentra dapat lebih memudahkan proses pembinaan, pembangunan infrastruktur pendukung industri, ketersediaan dan kepastian lahan serta muncul aglomerasi dan aliansi strategis diantara sesama industri. Karena itu pembangunan Sentra Industri bermuara peningkatan daya saing kolektif pada Sentra tersebut. Sedangkan untuk industri besar dapat dilakukan langkah-langkah dengan memberikan fasilitas fiskal serta kemudahan-kemudahan lain dalam kegiatan usaha industri, yang antara lain dengan tersedianya lokasi Industri yang memadai yang berupa Kawasan Industri.

Dalam upaya pelestarian nilai budaya bangsa yang tercermin dalam produk kerajinan diperlukan adanya wadah partisipasi masyarakat

bertaraf nasional yang berfungsi membantu dan sebagai mitra pemerintah dalam membina dan mengembangkan kerajinan. Atas dasar pemikiran tersebut dibentuklah Dewan Kerajinan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Bersama 2 Menteri, yaitu : Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 1981. Sedangkan untuk mendukung kelancaran kegiatannya ditingkat daerah, dipayungi Surat Menteri Dalam Negeri pada tahun yang sama.

Dekranasda melaksanakan kegiatan pembinaan bagi penumbuhan dan pengembangan produk kerajinan, pelatihan dan pendidikan sumber daya potensi, fasilitasi HAKI serta kerjasama kemitraan dengan Kementerian dan Organisasi Perangkat Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang terkait.

- b. **Sasaran II** : Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi Ekspor Non Migas.

Memiliki 2 indikator sasaran Nilai Ekspor Non Migas dan Disparitas Harga Anatar Wilayah, dimana Indikator sasaran Nilai Ekspor Non Migas dengan pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan sebesar 97.31% sampai bulan Desember dengan nilai ekspor 14,11%. Hal ini dikarenakan turunnya nilai ekspor non migas yang disebabkan oleh penurunan permintaan komoditi non migas di pasar ekspor yaitu China, India, dan Jepang sebagai negara tujuan utama ekspor non migas Kaltim.

Untuk indikator sasaran disparitas harga antar wilayah ditetapkan targetnya sebesar 20% dan realisasi capaian indikator sasaran sebesar 13,12%, sehingga persentase pencapaian indikator sasarannya sebesar 134,4%. Sehingga dapat diindikasikan bahwa perbedaan harga barang kebutuhan pokok antar wilayah kabupaten/kota semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa upaya

pemerintah untuk mengendalikan harga dan stok bahan pokok melalui berbagai kebijakan berjalan dengan baik.

Sehingga kedepannya diperlukan upaya program untuk mencari peluang pasar tujuan ekspor baru dan upaya diversifikasi komoditi/produk non migas Kaltim.

d. **Sasaran III** : Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen.

Dengan indikator sasaran Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) dengan capaian kinerja 128 persen. Hal ini dikarenakan perhatian pemerintah meningkatkan intensitas edukasi konsumen cerdas, peningkatan pembinaan kebijakan perlindungan konsumen bagi pelaku usaha baik melalui pengawasan barang beredar dan atau jasa, maupun edukasi secara langsung, serta meningkatkan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui penyelesaian berbagai pengaduan sengketa konsumen. Selanjutnya dikarenakan terbukanya berbagai sumber informasi dari media cetak dan elektronik.

f. **Sasaran IV** : Peningkatan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM sektor Produksi.

Dengan 3 indikator sasaran yaitu Koperasi Unggulan, UKM Unggulan dan Persentase Sumbangan Koperasi dan UKM Terhadap PDRB. Untuk indikator sasaran Koperasi Unggulan jumlah Koperasi Unggulan di Kalimantan Timur untuk tahun 2019 ini kondisinya cukup baik, dimana pencapaiannya sebesar 160%. Koperasi unggulan adalah koperasi berkualitas dengan omzet lebih dari 2 milyar, anggota lebih dari 500 orang, asset diatas 1 milyar, telah diaudit oleh auditor independen. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas sehat, SHU per anggota minimal 1X UMR.

Hal ini perlu untuk terus ditingkatkan melalui berbagai pembinaan berupa berbagai pelatihan antara lain diklat akutansi kepada

pengurus koperasi dan juga dengan dilakukannya pengawasan secara intensif terhadap kinerja koperasi yang ada.

Sedangkan untuk indikator sasaran UKM Unggulan dengan pencapaian mencapai 164%, mengalami peningkatan yang signifikan sejalan dengan meningkatnya jumlah pelaku UKM dan peningkatan jumlah koperasi Kalimantan Timur, hal ini juga diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan investasi di sektor Koperasi dan UKM. Hanya saja diperlukan peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi pelaku UKM dan SDM koperasi dalam rangka menghadapi persaingan dalam era MEA yang dimulai tahun 2015.

Indikator sasaran Persentase sumbangan PDRB sektor Koperasi dan UKM pada tahun 2019 mencapai 15.07%, dengan pencapaian terhadap target yang ditetapkan 4.5% adalah 334,89%. Terjadi peningkatan kontribusi dari tahun 2018 karena peran Koperasi dan UKM memiliki peran strategis dan penting dalam pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, KUKM juga berperan dalam distribusi hasil-hasil pembangunan, mengingat jumlah usaha di Kalimantan Timur mencapai 307.238 unit dan sebagian besar 97,61% adalah KUKM.

- l. Jumlah aparat yang mengikuti diklat yang berkualifikasi pada tahun 2019 sebanyak 36 orang dengan target 41 orang dan capaiannya adalah hanya 87,80%. Pencapaian kinerja tersebut terkendala dengan adanya aparat yang diikutkan dalam diklat tersebut harus mendukung tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya.
- m. Jumlah sarana pelayanan publik pada tahun 2019 sebanyak 10 sarana dan pencapaian terhadap target sebesar 100%. Untuk pelayanan publik terus diupayakan agar kedepan ada penambahan

sarana pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan ataupun memperbaiki sarana yang ada.

- n. Jumlah dokumen perencanaan sebagai pendukung kinerja organisasi pada tahun 2019 sebanyak 6 dokumen dengan target juga 6 dokumen, sehingga pencapaian terhadap targetnya mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena tidak adanya penambahan jenis dokumen baru yang dibutuhkan. - alternatif solusi.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a. Sasaran I : Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan

Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan bahwa setiap Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang didalamnya terdapat kebijakan pembangunan industri untuk mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan, sebagaimana juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan potensi daerah yang sesuai dengan kondisi daerah, kearifan lokal, potensi wilayah dan potensi unggulan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan industri diarahkan pada pengolahan sumber daya alam terbarukan yang tersedia di Kalimantan Timur, komoditi unggulan Kalimantan Timur adalah sawit, karet, kayu, rumput laut, udang, ikan dan gas alam dalam industri unggulan hulu agro, aneka, kimia dasar dan pangan.

Untuk menunjang pembangunan industri diatas maka pada tahun 2019 bidang industri mempunyai 2 program dan 3 kegiatan yaitu :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Industri.

- Kegiatan Koordinasi Peningkatan dan Pengembangan Industri.
2. Program Penataan Struktur Industri.
- Kegiatan Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu hingga Hilir
 - Kegiatan Pengembangan Sistem Data dan Informasi Industri Daerah

b. Sasaran II : Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, Daya Saing Komoditi dan Ekspor Non Migas.

Untuk menunjang sasaran diatas maka pada tahun 2019 bidang Perdagangan mempunyai 3 program dan 6 kegiatan yaitu :

1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
 - Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
 - Peningkatan sistem & jaringan informasi perdagangan
2. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan
 - Kordinasi Pengelolaan Isu-Isu Perdagangan
3. Program Peningkatan dan pengembangan ekspor
 - Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
 - membangun jejaring dengan eksportir
 - Koordinasi Program Pengembagnan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha

Melalui program kegiatan tersebut telah dilakukan beberapa upaya untuk pencapaian target indikator kinerja, yaitu :

Koordinasi dengan pelaku usaha,pihak terkait untuk mensinergikan kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting.

Mengoptimalkan forum kerjasama perdagangan dalam upaya ketercukupan pasokan kebutuhan pokok bagi masyarakat Kaltim.

Melakukan upaya stabilisasi harga melalui operasi pasar, monitoring harga dan stok bapokting dan pengembangan Sistem Informasi Perdagangan.

Mendorong peningkatan ekspor non migas non batubara melalui koordinasi dengan semua stake holder terkait dalam bentuk mencari informasi peluang pasar ekspor, pengumpulan data komoditi potensial ekspor dan mendorong penciptaan dan pendataan eksportir dan calon eksportir baru.

Fasilitas akses pasar luar negeri dan dalam negeri melalui misi dagang, business matching, forum kerjasama perdagangan dan business matching dengan buyer luar negeri.

- Melakukan operasi pasar dan pasar murah.
- Melakukan pemantauan harga.
- Mengadakan rapat koordinasi terkait ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan distributor dan Instansi teknis terkait.
- Menyediakan Sistem Informasi Perdagangan Dalam Negeri.
- Melakukan misi dagang dan pameran.
- Melakukan upaya melalui penyusunan program dan kegiatan yang mengarah kepada perubahan struktur ekspor non migas, yang berbasis primer.
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap upaya penggalan potensi ekspor di Kabupaten/Kota.
- Memasarkan produk ekspor non migas Kalimantan Timur melalui program misi dagang dan promosi/pameran di dalam dan luar negeri.
- Pembinaan eksportir harus terus dilakukan setiap tahunnya.
- Sosialisasi Kebijakan Ekspor dan Impor.
- Melakukan kajian ilmiah terhadap produk potensial ekspor kabupaten/kota se Kalimantan Timur.

- Mendorong ekspor produk kreatif dan jasa yang terutama dihasilkan oleh UKM.
- Pasar masih perlu dikembangkan dan diperkuat dengan pasar non tradisional dan pasar alternatif.

c. Sasaran III : Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan indeks keberdayaan konsumen yaitu :

- a. Peningkatan pembinaan kebijakan perlindungan konsumen bagi pelaku usaha di beberapa kabupaten/kota melalui edukasi.
- b. Kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha mulai tumbuh akan pentingnya barang dan atau jasa yang sesuai ketentuan untuk diperdagangkan.
- c. Peningkatan pengawasan barang beredar dan atau jasa di beberapa kabupaten/kota.
- d. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan konsumsi untuk mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa yang sesuai ketentuan.

Untuk menunjang meningkatkan indeks keberdayaan konsumen maka pada tahun 2019 bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang mempunyai 1 program dan 3 kegiatan yaitu :

1. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
 - Koordinasi Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen.
 - Peningkatan Pengawasan peredaran barang dan jasa.
 - koordinasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen

d. Sasaran IV : Peningkatan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM Sektor Produksi.

Untuk menunjang sasaran Peningkatan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM Sektor Produksi maka pada tahun 2019 mempunyai 1 program dan 3 kegiatan yaitu :

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif.
 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - Pengembangan Produksi dan Akses Usaha Kecil Menengah
3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
 - Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi
 - Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
 - Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi (DAK)
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah
 - Pengkajian Pengembangan Pelatihan Koperasi & UMKM
 - Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi dan UMKM

Sedangkan Upaya yang dilakukan adalah :

- Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada semua stake holder baik di level provinsi maupun kabupaten/kota tentang pembagian kewenangan pembinaan koperasi dan UKM. Selain itu dilakukan penyesuaian-penyesuaian program pembinaan bagi UKM dan koperasi yang dikerjasamakan atau dimitrakan dengan beberapa pihak antara lain Perbankan, Retail Modern, dinas kabupaten/kota dan SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota.

- Pembentukan Klinik Bisnis koperasi dan UKM yang didukung oleh para pendamping untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi pemasaran produk baik secara online maupun offline.
- Melakukan beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dan koperasi baik dari aspek kelembagaan, usaha, produksi, pemasaran dan pembiayaannya. Selain itu Klinik Bisnis juga menyelenggarakan classbusiness yang diikuti oleh para pelaku UKM untuk pemahaman UMKM dalam kemampuan yang lebih teknis antara lain aspek kemasan, pembukuan usaha, perijinan usaha dll.
- Memfasilitasi dan mendorong UKM untuk meningkatkan kualitas produknya dan mengurus perijinan usaha untuk mendukung daya saing produk. Berbagai upaya dilakukan misalnya memfasilitasi UKM ikut pameran, fasilitasi pemasaran ke retail modern serta pengurusan ijin usaha (IUMK, PIRT, Halal dll)
- Meningkatkan kapasitas SDM para pendamping melalui diklat/bimtek pendamping, mengikutsertakan beberapa pendamping dalam program/kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi lain.
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data koperasi tidak aktif dengan dinas kabupaten/kota untuk menghindari adanya kesalahan dalam upaya pembubaran koperasi tidak aktif. Selain itu data keragaan koperasi dan data per jenis koperasi yang dientry dalam ODS agar dilakukan updating secara berkala oleh Tim Data Kabupaten/Kota.
- Dilakukan upaya pembinaan kepada koperasi aktif yang belum melakukan RAT dalam bentuk pendampingan untuk segera melakukan RAT dan mengurus Sertifikat Nomor Induk Koperasi sebagai bukti bahwa koperasi yang bersangkutan adalah koperasi yang aktif melakukan RAT.
- Pembentukan Satgas Pengawasan Koperasi yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi

ditinjau dari aspek kelembagaan, usaha, permodalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Melakukan pertemuan dan sosialisasi dengan beberapa stake holder dalam mengoptimalkan program kemitraan antara pengusaha besar dengan UKM dan koperasi. Kemitraan yang diberikan oleh perusahaan besar melalui pola CSR atau kemitraan dalam melakukan usaha seperti koperasi perkebunan dengan perusahaan kelapa sawit.

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Terlampir disampaikan tingkat efisiensi atas capaian kinerja dan penyerapan anggaran, dimana terdapat 7 (tujuh) indikator dengan capaian diatas 100%. Adapun tingkat efisiensi tertinggi pada indikator Persentase sumbangan Koperasi dan UKM Terhadap PDRB dengan tingkat efisiensi mencapai 265.09 % sedangkan tingkat efisiensi terendah pada indikator Nilai ekspor non migas, yaitu minus -5.06.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)	88.85	91.52	-2.67
2	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas	Nilai ekspor non migas	91.31	96.37	-5.06
		Disparitas harga antar wilayah	152.44	95.52	56.92
3	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	128	86.30	41.70
4	Peningkatan usaha ekonomi Koperasi dan UKM sektor Produksi	Koperasi Unggulan	160	69.80	90.20
		UKM Unggulan	164	69.80	94.20
		Persentase sumbangan Koperasi dan UKM Terhadap PDRB	334.89	69.80	265.09

Tabel Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Nilai Efisiensi	Persentase	Total APBD Non Gaji		Jumlah Program/Kegiatan yang Dialokasikan		Total Program/Kegiatan		Ket
					Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan	Program	Kegiatan	Program	kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2018	31,397,137,000	29,571,680,437	94.18591	94.19	2,853,842,500	14,413,461,147	14	18	13	18	
2019	50,424,740,716	43,020,234,676	85.31573	85.32	3,280,300,000	18,464,459,716	21	37	21	37	

D.Realisasi Anggaran

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran (Rp)			Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi	Realisasi	Capaian %	
1	Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan	20	17.77	90.05	3,230,800,000	3,013,925,417	97.35%	
2	Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas	15.2	10.7	70.39	6,545,900,000	6,372,734,504	97.35 %	
		20	13.80	152.44				
3	Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	30	38.4	128	2,150,000,000	1,855,363,111	86.30 %	
4	Peningkatan usaha ekonomi Koperasi dan UKM sektor Produksi	10	16	160	16,868,695,000	14,922,377,751	69.80%	
		25	41	164				
		4.5	15.07	334.89				

2. Realisasi anggaran per program dan Kegiatan

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			KETERANGAN
		ALOKASI	REALISASI	%	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,292,811,500	2,996,178,554		
	- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	4,292,811,500	2,996,178,554	70	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,726,148,500	3,468,364,140		
	- Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	2,552,650,000	2,336,612,115	92	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	1,173,498,500	1,131,752,025	96	
3.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1,576,015,000	1,561,081,214	99.05	

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			KETERANGAN
		ALOKASI	REALISASI	%	
	- Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	1,229,915,000	1,226,776,814	99.74	
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	346,100,000	334,304,400	97	
	KOPERASI - PERENCANAAN				
4	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	1,066,200,000	933,379,830	87.54	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	548,600,000	423,810,800	77.25	
	- Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	517,600,000	509,569,030	98.45	
	KOPERASI - KOPERASI				
5	Program Penciptaan Iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	1,194,160,000	1,121,651,700	93.93	
	- Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	1,194,160,000	1,121,651,700	93.93	
6	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	571,570,000	515,599,076	90.21	
	- Pengembangan Produksi dan Akses Usaha Kecil Menengah	571,570,000	515,599,076	90.21	
7	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	4,441,790,000	4,326,123,237	97.40	
	- Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	416,630,000	393,874,864	94.54	
	- Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	453,640,000	445,716,600	98.25	
	- Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi (DAK)	3,571,520,000	3,486,531,773	97.62	
	INDUSTRI				
8	Program Penataan struktur industri	626,000,000	572,891,667	91.52	
	- Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu hingga ke Hilir	500,000,000	459,518,584	91.90	
	- Pengembangan Sistem Data dan Informasi Industri Daerah	126,000,000	113,373,083	89.98	
9	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	2,604,800,000	2,441,033,750	93.71	

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			KETERANGAN
		ALOKASI	REALISASI	%	
	- Koordinasi peningkatan dan pengembangan industri	2,604,800,000	2,441,033,750	93.71	
PERDAGANGAN - PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAWASAN BARANG					
10	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	2,150,000,000	1,855,363,111	86.30	
	- Koordinasi Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	550,475,000	453,896,873	82.46	
	- Peningkatan Pengawasan peredaran barang dan jasa	446,775,000	375,474,016	84.04	
	- koordinasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen	1,152,750,000	1,025,992,222	89.00	
	PERDAGANGAN - PERDAGANGAN				
11	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	971,600,000	920,099,800	94.70	
	- Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	307,600,000	267,101,400	86.83	
	- Peningkatan sistem & jaringan informasi perdagangan	664,000,000	652,998,400	98.34	
12	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan	1,079,400,000	1,039,014,500	96.26	
	- Kordinasi Pengelolaan Isu-Isu Perdagangan	1,079,400,000	1,039,014,500	96.26	
13	Program Peningkatan dan pengembangan ekspor	737,000,000	710,218,000	96.37	
	- Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	108,000,000	94,055,900	87.09	
	- membangun jejaring dengan eksportir	355,200,000	349,147,100	98.30	
	- Koordinasi Program Pengembagnan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha	273,800,000	267,015,000	97.52	
	UPTD BPSMB				
14	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,132,000,000	1,090,481,850	96.33	
	- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1,132,000,000	1,090,481,850	96.33	
15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	359,400,000	357,177,400	99.38	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	359,400,000	357,177,400	99.38	

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			KETERANGAN
		ALOKASI	REALISASI	%	
16	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	308,100,000	307,320,460	99.75	
	- Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	160,000,000	159,638,000	99.77	
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	148,100,000	147,682,460	99.72	
17	Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang	1,958,400,000	1,948,422,494	99.49	
	- Penerapan dan Pengamanan Standarisasi Jaminan Mutu Barang	1,511,400,000	1,508,190,394	99.79	
	- Pelayanan Jasa Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi	447,000,000	440,232,100	98.49	
	UPTD Pelatihan Koperasi & UKM				
18	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,209,200,000	1,112,899,569	92.04	
	- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1,209,200,000	1,112,899,569	92.04	
19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	622,650,000	547,365,638	87.91	
	- Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	72,800,000	59,800,000	82.14	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	549,850,000	487,565,638	88.67	
20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	409,900,000	379,938,300	92.69	
	- Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	334,900,000	306,629,700	91.56	
	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75,000,000	73,308,600	97.74	
21	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah	923,136,000	893,095,330	96.75	
	- Pengkajian Pengembangan Pelatihan Koperasi & UMKM	444,230,000	438,685,230	98.75	
	- Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi dan UMKM	478,906,000	454,410,100	94.89	
JUMLAH		31,960,281,000	29,097,699,620	91.04	

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj-IP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019. LKj-IP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, dan diperbarui melalui Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 23 November 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja dan disempurnakan lagi dengan peruran Gubernur nomor 42 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 ini dibuat sebagai Perjanjian Kinerja Pimpinan SKPD kepada Kepala Daerah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada Diktum Ketiga tentang Penetapan Kinerja. LKj-IP Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2019 telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dan disepakati oleh masing-masing Kepala Bidang beserta struktural dibawahnya dan disetujui oleh Kepala Dinas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah.

LKj-IP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 ini memberikan gambaran antara lain :

- Secara umum kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur ditinjau dari pencapaian

indikator kinerja dapat dikategorikan berhasil, walaupun terdapat beberapa indikator kinerja yang target pencapaiannya masih perlu ditingkatkan. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras seluruh aparat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur maupun Kab/Kota, Dinas/Instansi terkait, Dunia Usaha dan Sekretariat Daerah Provinsi yang dengan kerjasama dan sinkronisasi programnya turut memberikan kontribusi.

- Ditinjau dari dari pencapaian sasaran strategik, juga dapat dikategorikan berhasil, dimana dari 4 (empat) sasaran dengan 7 indikator yang telah ditetapkan, 4 (empat) diantaranya diatas 100 (seratus) dan 2 (dua) lainnya diatas 90 (sembilan puluh) dan 1 (satu) indikator dengan persen dengan nilai diatas 60 (enam puluh). Keadaan ini semakin memicu kita untuk bekerja lebih keras dan pemahaman yang lebih mendalam atas segala permasalahan dan tantangan yang ke depan semakin kompleks.

Dengan laporan LKj-IP ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan yang melibatkan stakeholders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.